

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, EFEKTIFITAS DAN PERTUMBUHAN PADA KABUPATEN SOPPENG

(Evamitria¹), (Dr. H. Akmal Umar²), (Dr. Hasmin³)

¹Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar
email : eva_mitria@yahoo.com

²Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar
email : akmal@yahoo.ac.id

³Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar
email : hasmin@stieamkop.ac.id

ABSTRACT

This study attempts to 1) To know influence of independence ratio on financial performance of Soppeng Regency. 2) Influence the effectiveness of the performance of the local government finance on financial management agency and assets Area Soppeng Regency 2013-2015 years. 3) Influence the ratio growth of the performance of the local government finance on financial management agency and assets Area Soppeng Regency 2013-2015 years. 4) Influence the ratio independence, the ratio effectiveness and the growth of the performance of the local government finance on financial management agency and assets Area Soppeng Regency of the years 2013-2015.

The result showed that 1) the independence of the Soppeng Regency has Positive significant against efficiency pad in the past three years (2013-2015). 2) the ratio of the effectiveness of the Soppeng Regency has positive significant against efficiency pad in the past three years (2013-2015). 3) a partial, the ratio of growth the Soppeng has regency negative and not significant against efficiency pad in the past three years (2013-2015). 4) the ratio of independence, effectiveness, and ratio growth significant against efficiency pad in the past three years (2013-2015).

Keywords : *Ratio of Independence, Effestiveness Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio, Revenue (PAD)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 2) Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015. 3) Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Soppeng tahun 2013-2015. 4) Pengaruh Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapaan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Rasio Keamandirian Pemkab Soppeng berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 2) Rasio Efektifitas Pemkab Soppeng berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 3) Secara parsial, Rasio pertumbuhan PAD Pemkab Soppeng berpengaruh negative dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). 4) Rasio kemandirian, Efektifitas dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015).

Kata kunci : *Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan PAD.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah ini sangat identik dengan tuntutan adanya Good Governance. Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. disingkat APBD. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja,

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

APBD yang telah dilaksanakan. rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten (Halim, 2007: 233) antara lain rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Kabupaten Soppeng sebagai obyek penelitian dengan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel mengenai penggunaan APBD Soppeng 2010 yang bermasalah sebesar Rp. 4,3 miliar. Dana tersebut direalisasikan untuk beberapa kegiatan, seperti belanja hibah, bantuan sosial, dan transfer/bagi hasil ke desa yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya (BPK RI Sulsel, September 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 ?
2. Apakah Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng tahun 2013-2015 ?
3. Apakah Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng tahun 2013-2015 ?
4. Apakah Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Dinas pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015
2. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015
3. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015

4. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Kieso dkk. (2002:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.5 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah .
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Daerah :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.1.7 Keuangan Daerah dalam era otoda :

Pengelolaan belanja daerah di era otonomi daerah dengan alat pengukur berupa regulasi tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2. Belanja pembangunan
3. Selain belanja dimaksud terdapat belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang terbentuk dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan bantuan keuangan (sebelum otonomi daerah) serta pengeluaran tidak tersangka dengan istilah dan maksud yang sama seperti sebelum otonomi daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten.

2.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 (Pajak dan Retribusi Daerah) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”.

2.2.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah) Pasal 26 Ayat (3) menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah /BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.4 Lain Asli Pendapatan daerah yang sah

Meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, Pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan dari selisih

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi.

2.2.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah: “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Keuangan daerah menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dalam penjelasan umum Pasal 156 Ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Halim (2004: 150) menyatakan ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

2. Rasio Efektivitas PAD.

menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

3. Rasio Pertumbuhan PAD

Mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dan periode ke periode berikutnya.

PADt1 – PADt0

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100 \%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Maharani (2006), dengan Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemerintah Daerah Kota Batu cenderung mengalami ketergantungan financial yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat.

Yuniarti (2011) dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, rasio kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan.

Santosa, et al (2014) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD jika dilihat dari kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pusat sangat tinggi.

2.7 Kerangka Pikir

2.7.1 Hubungan Antara Rasio Kemandirian dengan Kinerja Keuangan

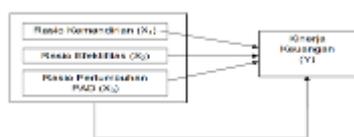
Jika hasil penelitian terkait kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Semakin tinggi ini berarti tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Hubungan Antara Rasio Efektivitas dengan Kinerja Keuangan

Pemda dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah atau kinerja keuangan semakin baik.

Hubungan Antara Rasio Pertumbuhan dengan Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng dapat diukur dengan membandingkan persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun akhir dengan tahun sebelumnya. Jika persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun semakin meningkat ini menandakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng semakin meningkat.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.8 Hipotesis

1. Diduga Rasio Kemandirian berpengaruh

positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.

2. Diduga rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.
3. Diduga Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.
4. Diduga Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian dan Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2015.

3, METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan februari 2017.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai 2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Tinjauan Pustaka (Library Research)
- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Sekunder.

3.5 Definisi Operasional variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (X)

- a. Rasio Kemandirian (X_1)

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. *Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan*

demikian pula sebaliknya.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

b. Rasio Efektifitas (X_2)

Menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

c. Rasio Pertumbuhan PAD (X_3)

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100 \%$$

2. Variabel Terikat Y (Kinerja Keuangan daerah).

Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Biaya Pungutan PAD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

3,6 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011) adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

Y : Kinerja Keuangan Daerah

X_1 : Rasio Kemandirian

X_2 : Rasio Efektifitas

X_3 : Rasio Pertumbuhan PAD

b_0 : Nilai Intercept (Konstanta)

$b_1 b_2 b_3$: Koefisien arah regresi

E

Uji hipotesis yang sebagai berikut :

1. Uji Simultan (Uji F)

langkah-langkah yang digunakan untuk uji F adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh Variabel x dan Y, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima ini berarti terdapat pengaruh simultan oleh variabel x dan Y. Penentuan nilai kritis yang menentukan level of signifikan $\alpha = 5\%$. Nilai kritis F didapat dari

tabel distribusi F dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 % ($\alpha = 0,005$).

2. Uji Parsial (Uji t)

langkah-langkah yang digunakan untuk uji t (uji parsial) adalah : Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini berarti tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. Jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti ada pengaruh antara variabel X dan Y. Penentuan nilai kritis yang menentukan level of signifikan $\alpha = 5\%$. Nilai kritis t didapat dari tabel distribusi t dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 % ($\alpha = 0,05$)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Variabel Kinerja Keuangan

A. Rasio Kemandirian

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2013

Tahun	Bulan	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Yang sah (Rp)	Rasio Kemandirian(%)
2013	1	1.086.231.000,00	130.626.979.946,00	8.681.245.500,00	0,78
	2	1.201.416.597,00	12.705.330.880,00	8.916.700.890,00	5,56
	3	1.954.840.890,00	32.219.879.999,00	9.711.210.630,00	4,66
	4	1.580.491.090,00	43.006.104.780,00	9.306.881.090,00	3,02
	5	1.974.851.710,00	36.020.926.473,00	8.507.430.800,00	4,44
	6	2.096.301.040,00	38.700.940.480,00	6.731.501.470,00	4,61
	7	1.450.451.595,00	41.601.010.527,00	6.021.194.481,00	3,05
	8	1.632.354.886,00	23.206.151.297,00	3.348.024.883,00	6,15
	9	1.697.110.876,00	34.471.310.696,00	4.317.077.840,00	4,38
	10	2.295.145.077,00	40.125.667.909,00	5.993.220.453,00	5,02
	11	3.891.387.053,00	14.045.679.994,00	14.045.679.994,00	7,26
	12	13.499.390.266,00	152.912.672.631,00	41.890.052.247,00	6,93

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016.

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Soppeng pada tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulan yakni sebanyak enam kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 4,78% (0,78%-5,56%), April-Mei sebesar 1,42% (3,02%-4,44%), Mei-Juni sebesar 0,17% (4,44%-4,61%), Juli-Agustus sebesar 3,45% (3,05%-6,5%), September-Oktober sebesar 0,64 (4,38%--5,02%) dan Oktober-November sebesar 2,24% (5,02%-7,26%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak lima kali pada bulan Februari-Maret sebesar 0,88% (5,54%-4,66%), bulan Maret-April sebesar 1,64% (4,66%-3,02%), Juni-Juli sebesar 1,56% (4,61%-3,05%), Agustus-September sebesar 1,77% (6,15%-4,38%), dan November-Desember sebesar 0,33 % (7,26%-6,93%)

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2014

Tahun	Bulan	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer Dana Pembiangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Yang sah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2014	1	2.348.426.237,00	52.750.223.724,00	5.487.210.995,00	4,03
	2	1.648.033.303,00	53.703.805.226,00	8.377.068.724,00	2,66
	3	3.362.508.798,00	52.482.832.312,00	4.691.125.114,00	5,88
	4	2.223.890.286,00	52.828.489.325,00	9.230.955.807,00	3,58
	5	5.381.417.368,00	53.540.494.414,00	11.672.454.828,00	8,25
	6	3.845.915.654,00	54.110.874.249,00	9.714.010.535,00	6,03
	7	3.812.475.130,00	54.822.878.077,00	11.818.555.022,00	5,42
	8	5.807.460.268,00	59.671.035.999,00	10.344.866.014,00	8,22
	9	4.132.631.988,00	58.550.448.910,00	10.325.684.752,00	6,18
	10	5.601.580.749,00	58.734.362.884,00	14.098.383.848,00	7,91
	11	6.328.381.419,00	57.975.595.508,00	8.080.890.269,00	9,58
	12	6.070.781.884,00	56.883.487.540,00	39.211.064837,00	6,31

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2015

Tahun	Bulan	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer Dana Pembiangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan Yang sah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2015	1	2.716.545.257,00	58.417.376.420,00	9.650.585.451,00	3,99
	2	3.233.644.069,00	62.693.967.314,00	11.873.309.473,00	4,34
	3	4.480.994.323,00	57.907.248.314,00	14.462.454.622,00	6,19
	4	4.877.426.334,00	62.982.369.438,00	11.571.812.526,00	6,54
	5	2.964.460.505,00	69.061.859.422,00	17.200.365.438,00	3,44
	6	4.364.637.284,00	61.651.792.673,00	20.310.461.507,00	5,33
	7	4.487.263.846,00	72.987.310.156,00	18.502.073.955,00	4,90
	8	3.880.865.595,00	61.975.046.494,00	22.645.548.701,00	4,58
	9	4.774.477.944,00	62.682.324.475,00	34.587.662.199,00	4,89
	10	6.991.730.749,00	65.866.248.259,00	22.435.774.816,00	8,41
	11	8.950.036.236,00	61.131.791.736,00	28.153.230.257,00	7,78
	12	8.264.702.880,00	68.024.879.193,00	10.067.287.067,00	10,56

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

Pada tabel 4.3 diketahui rasio kemandirian pendapatan asli daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan setiap bulan yakni sebanyak tujuh kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 0,35% (3,99%-4,34%), Februari-Maret sebesar 1,85% (4,34%-6,19%), Maret-April sebesar 0,35% (6,19%-6,54%), Mei-Juni sebesar 1,89% (3,44%-5,33%), Agustus-September sebesar 0,31% (4,58%--4,89%), September-Oktober sebesar 3,52% (4,89%-8,41%) dan November-Desember sebesar 2,8% (7,78%-10,58%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak tiga kali pada bulan April-Mei sebesar 3,1% (6,54%-3,44%), Juni-Juli sebesar 0,43% (5,33%-4,9%) dan Oktober-November sebesar 0,63% (8,41%-7,78%).

B. Rasio Efektifitas

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2013

Tahun	Bulan	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2013	1	1.557.374.144,00	1.095.231.000,00	143,37
	2	1.598.588.848,00	1.201.418.998,00	133,08
	3	1.016.128.248,00	1.954.840.850,00	62,67
	4	1.804.657.274,00	1.690.491.050,00	114,18
	5	1.928.781.411,00	1.974.851.710,00	97,67
	6	2.305.754.164,00	2.085.301.040,00	110,64
	7	1.731.627.239,00	1.450.451.595,00	119,39
	8	1.858.713.888,00	1.632.354.888,00	113,74
	9	2.229.502.413,00	1.697.110.870,00	131,02
	10	4.994.548.921,00	2.295.145.077,00	217,91
	11	7.431.451.405,00	3.691.387.053,00	199,97
	12	11.048.308.185,94	13.489.380.286,00	81,83

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rasio Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulan yakni

sebanyak enam kali, yaitu pada bulan Maret-April sebesar 31,51% (82,67%-114,18%), Mei-Juni sebesar 12,37% (97,67%-110,04%), Juli-Agustus sebesar 9,35% (110,04%-119,39%), Agustus-September sebesar 17,28% (113,74%-131,02%), dan September-Oktober sebesar 86,59 % (131,02%--217,61%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak lima kali pada bulan Januari-Februari sebesar 10,31% (143,37%-133,06%), bulan Februari-Maret sebesar 50,39% (133,06%-82,67%), April-Mei sebesar 16,51% (114,18%-97,67%), Juli-Agustus sebesar 5,65% (119,39%-113,74%), Oktober-November sebesar 26,64% (217,61%-190,97%), dan November-Desember sebesar 109,14 % (190,97%-81,83%).

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2014

Tahun	Bulan	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2014	1	2.661.766.012,00	2.348.426.237,00	109,94
	2	1.992.988.232,00	1.648.533.303,00	117,25
	3	4.622.752.131,00	3.362.508.798,00	137,48
	4	1.481.601.376,00	2.223.890.286,00	66,62
	5	7.377.930.845,00	5.381.417.368,00	137,10
	6	4.670.298.188,00	3.845.915.654,00	121,44
	7	4.824.417.167,00	3.612.475.130,00	133,55
	8	7.820.985.519,00	5.807.460.268,00	134,67
	9	4.148.446.390,00	4.132.631.988,00	0,38
	10	5.867.056.227,00	5.601.580.749,00	106,35
	11	7.442.162.591,00	6.328.381.419,00	117,60
	12	76.839.166.785,00	6.000.070.781.884,00	1,28

Sumber : Data Sekunder yang diolah (lampiran), 2016

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rasio Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada tahun 2014 mengalami kenaikan drastis setiap bulan yakni sebanyak tujuh kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 7,31% (109,94%-117,25%), Februari-Maret sebesar 20,23% (117,25%-137,48%), April-Mei sebesar 70,48% (66,62%-137,1%), Mei-Juni sebesar 15,66% (137,1%-121,44%), Juni-Juli sebesar 12,11% (121,44%--133,55%), Juli-Agustus sebesar 1,12% (133,55%-134,,67%) dan Oktober-November sebesar 11,25% (106,35%-117,6%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak empat kali pada bulan Maret-April sebesar 30,14% (36,48%-66,62%), bulan Mei-Juni sebesar 15,66% (137,1%-121,44%), Agustus-September sebesar 134,29% (134,67%-0,38%), dan November-Desember sebesar 116,32% (117,6%-1,28%).

Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2015

Tahun	Bulan	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2015	1	3.136.099.359,00	2.716.545.257,00	115,44
	2	5.382.964.701,00	3.233.644.069,00	166,47
	3	4.512.567.417,00	4.480.994.323,00	100,70
	4	4.171.654.273,00	4.877.426.334,00	85,53
	5	5.270.622.948,00	2.964.460.509,00	177,79
	6	7.579.845.211,00	4.364.637.284,00	173,66
	7	8.870.475.704,00	4.487.263.846,00	195,11
	8	5.069.355.788,00	3.880.865.695,00	130,62
	9	4.917.746.113,00	4.774.477.944,00	103,00
	10	6.012.217.880,00	6.991.730.749,00	85,99
	11	8.986.910.203,00	6.950.036.239,00	129,31
	12	8.582.048.995,15	8.264.702.880,00	79,76

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rasio

Efektifitas keuangan daerah Pemkab Soppeng pada tahun 2015 mengalami kenaikan setiap bulan yakni sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 51,03% (115,44%-166,47%), April-Mei sebesar 92,26% (85,53%-177,79%), dan Oktober-November sebesar 43,32% (85,99%-129,31%). Selebihnya mengalami penurunan yang drastis sebanyak delapan kali pada bulan Februari-Maret sebesar 65,77% (166,47%-100,7%), bulan Maret-April sebesar 15,17% (100,7%-85,53%), Mei-Juni sebesar 4,13% (177,79%-173,66%), Juni-Juli sebesar 20,55% (173,66%-153,11%), Juli-Agustus sebesar 22,49% (153,11 %-130,62%), Agustus-September sebesar 27,62% (130,62%-103,00%), September-Oktober sebesar 49,55% (103,00%-85,59%), dan November-Desember sebesar 49,55% (129,31%-79,76%).

C. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.7
Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013

Tahun	Bulan	PAD ₀ (Rp)	PAD ₁ (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2013	01-02	1.201.416.597,00	1.086.231.000,00	-9,58
	02-03	1.854.840.850,00	1.201.416.597,00	38,54
	03-04	1.580.491.050,00	1.954.840.850,00	-23,69
	04-05	1.974.851.710,00	1.590.491.050,00	0,00
	05-06	2.096.301.040,00	1.974.851.710,00	5,79
	06-07	1.450.451.595,00	2.096.301.040,00	44,53
	07-08	1.632.354.886,00	1.450.451.595,00	11,14
	08-09	1.697.110.876,00	1.632.354.886,00	3,82
	09-10	2.296.145.077,00	1.697.110.876,00	26,06
	10-11	3.891.387.053,00	2.296.145.077,00	41,02
	11-12	13.499.390.266,00	2.040.305.487,00	84,88

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rasio Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng dikelompokkan kedalam tiga kurun waktu tahun terakhir (2013-2015). Adapun pada tahun 2013 mengalami kenaikan setiap bulan yakni sebanyak tujuh kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 9,58% (0,00%-(-9,58%)), Februari-Maret sebesar 28,96% (-9,58-38,54%), April-Mei sebesar 23,68% (-23,68%-0%), Mei-Juni sebesar 5,79 % (0 %-5,79%), Juli-Agustus sebesar -55,67% (-44,53-11,14%), September-Oktober sebesar 22,24% (3,82%-26,06%), dan Oktober-November sebesar 14,96% (26,06%--41,02%), November-Desember sebesar 43,86% (41,02%-84,88%) Selebihnya mengalami penurunan sebanyak tiga kali pada bulan Maret-April sebesar 14,86% (38,54-(-23,68)%), Juni-Juli sebesar 38,74% (5,79%--(-44,53%)) dan Agustus-September sebesar 7,32% (11,14%-3,82%) .

Tabel 4.8
Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014

Tahun	Bulan	PAD ₀ (Rp)	PAD ₁ (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2014	01-02	1.648.533.303,00	2.348.426.237,00	42,46
	02-03	3.362.508.798,00	1.648.533.303,00	50,97
	03-04	2.223.890.288,00	3.362.508.798,00	-51,19
	04-05	5.381.417.368,00	2.223.890.288,00	58,67
	05-06	3.845.915.654,00	5.381.417.368,00	-39,79
	06-07	3.612.475.130,00	3.845.915.654,00	-6,46
	07-08	5.807.460.268,00	3.612.475.130,00	37,79
	08-09	4.132.631.866,00	5.807.460.268,00	-40,53
	09-10	5.801.589.749,00	4.132.631.866,00	26,22
	10-11	6.328.381.419,00	5.801.589.749,00	11,48
	11-12	6.070.781.884,00	6.328.381.419,00	-4,24

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran), 2016

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rasio Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak empat kali, yaitu pada bulan Januari-Februari sebesar 42,46% (0,00%-42,46%), Februari-Maret sebesar 8,51% (42,46-50,97%), April-Mei sebesar 7,48% (-51,19%-58,67%), Juli-Agustus sebesar -31,33% (-6,46%-37,79%) dan September-Oktober sebesar 14,31% (-40,53%-26,22%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak Enam kali pada bulan Maret-April sebesar 102,16% (50,97%-(-51,19%)), bulan Mei-Juni sebesar 98,6% (58,67%-(-39,93%)), Juni-Juli sebesar (-33,47%) ((-39,93%)-(-6,46%)), Agustus-September sebesar 78,32% (37,79%-(-40,53%)), Oktober-November sebesar 14,74% (26,22%-11,48%) dan November-Desember sebesar 15,72% (11,48%-(-4,24%)).

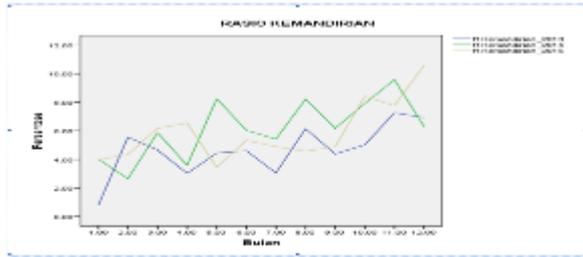
Tabel 4.9
Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015

Tahun	Bulan	PAD ₀ (Rp)	PAD ₁ (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2015	01-02	Rp 3.233.644.069	Rp 2.716.545.257	-15,99
	02-03	Rp 4.480.994.323	Rp 3.233.644.069	-27,84
	03-04	Rp 4.877.426.334	Rp 4.480.994.323	-8,13
	04-05	Rp 2.964.460.509	Rp 4.877.426.334	64,53
	05-06	Rp 4.364.637.284	Rp 2.964.460.509	-32,08
	06-07	Rp 4.487.283.846	Rp 4.364.637.284	-2,73
	07-08	Rp 3.880.885.695	Rp 4.487.283.846	15,63
	08-09	Rp 4.774.477.944	Rp 3.880.885.695	-18,72
	09-10	Rp 6.991.730.749	Rp 4.774.477.944	-31,71
	10-11	Rp 6.950.036.239	Rp 6.991.730.749	0,59
	11-12	Rp 8.264.702.860	Rp 6.950.036.239	-15,91

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran), 2016

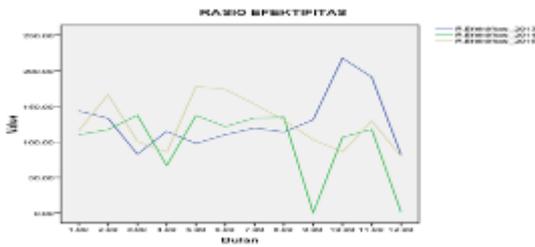
Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa rasio Pertumbuhan keuangan daerah Pemkab Soppeng tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak lima kali yaitu pada bulan Februari-Maret sebesar 11,85% (-15,99%-(-27,84%)), April-Mei sebesar 72,66% ((-8,13%-64,53%), Juli-Agustus sebesar 12,9% (-2,73-15,63%), September-Oktober sebesar -12,99% (-18,72%-(-31,71%)) dan oktober-November sebesar (-32,3%) (-31,71%-0,59%). Selebihnya mengalami penurunan sebanyak empat kali pada bulan Maret-April sebesar -19,71% (-27,84%-(-8,13%)), Mei-Juni sebesar 96,61% (64,53%-(-32,08%)), Juni-Juli sebesar -29,35% (-32,08%-(-2,73%)), Agustus-September sebesar 3,09% (15,63%-18,72%) dan November -Desember sebesar -16,5% (0,59%-(-15,91%)).

4.2 Perkembangan Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan dapat dilihat pada diagram dibawah ini



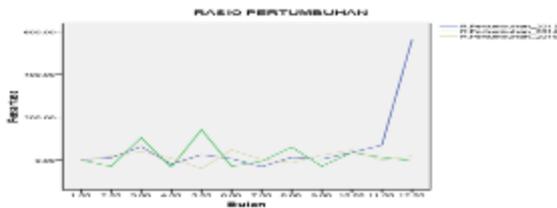
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran). 2016
Gambar 4.1
Perkembangan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2013-2015

Pada, terbukti dengan nilai probabilitas $0,04 < 0,05$. Model regresi yang terbentuk dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio kemandirian satu satuan akan diikuti kenaikan efisiensi PAD Sementara itu, rasio kemandirian Pemkab Soppeng cukup dinamis dengan adanya kenaikan dan penurunan dalam tiga tahun terakhir (2013-2015).



Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran). 2016
Gambar 4.2

Pada Gambar 4.2 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa apa yang ditargetkan sebagian besar sesuai dengan realisasi yang ada.



Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran)
Gambar 4.3
Perkembangan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2013-2015

4.4 Hipotesis Penelitian

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	181,490	65,237		2,782	,009
	R_Kemandirian	12,747	7,702	,292	0,005	,004
	R_Efektifitas	,393	,350	,190	0,023	,002
	R_Pertumbuhan	-,031	,157	-,034	1,97	,845

a. Dependent Variable: R_Efisiensi
Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran). 2016

Persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 181,49 + 12,75 X_1 + 0,39 X_2 - 0,31 X_3$$

di mana:

X_1 = Rasio Kemandirian

X_2 = Rasio Efektifitas

X_3 = Rasio Pertumbuhan PAD

1. Uji T atau Uji Parsial

a. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Efisiensi PAD. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh rasio kemandirian terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 0,005 dan t_{tabel} sebesar 1,69552 dengan nilai signifikansi 0,108. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

b. Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Efisiensi PAD Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh rasio efektifitas terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 0,023 dan t_{tabel} sebesar 1,69552 dengan nilai signifikansi 0,02. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektifitas berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

c. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Efisiensi PAD Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh rasio pertumbuhan PAD terhadap efisiensi PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh t_{hitung} sebesar 1,97 dan t_{tabel} sebesar 1,69552 dengan nilai signifikansi 0,845. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi PAD.

2. Uji F atau Uji Simultan

Tabel 4.14
Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30433,638	3	10144,546	2,902	,029
	Residual	249365,667	32	7792,684		
	Total	279799,305	35			

a. Predictors: (Constant), R_Pertumbuhan, R_Efektifitas, R_Kemandirian
b. Dependent Variable: R_Efisiensi

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran). 2016

Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) di

atas, diperoleh F_{hitung} sebesar 2,902 dan F_{tabel} sebesar 2,67 dengan nilai signifikansi 0,029. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh secara simultan terhadap efisiensi PAD.

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.932 ^a	.808	.805	88.27618

a. Predictors: (Constant), R_Pertumbuhan, R_Efektifitas, R_Kemandirian
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (Lampiran) 2016

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar .808. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (rasio kemandirian, efektifitas, dan pertumbuhan PAD) dapat menjelaskan sebesar 80,8% terhadap variabel dependen (efisiensi PAD), dan sisanya sebesar Rp. 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Efisiensi PAD

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sependapat dengan Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

2 Pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Efisiensi PAD

Rasio efektifitas mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara rasio efektifitas terhadap tingkat efisiensi PAD Kabupaten Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efektifitas kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin baik dalam pembentukan tingkat efisiensi PAD Kabupaten Soppeng. Pemerintah Kabupaten Soppeng kaitannya dengan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli daerah pada

hakikatnya menunjukkan suatu kondisi dimana daerah kabupaten Soppeng mampu menggali sumber keuangannya, mengelola dan memanfaatkan secara memadai untuk membiayai aktifitas dalam urusan otonomi daerah, hal yang lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan memutuskan memanfaatkan cadangan tambang sebagai motor untuk menggerakkan ekonomi.

3. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Efisiensi PAD

Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi PAD. Penyebab rendahnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng adalah :

1. Kurang terampilnya Pemkab Soppeng dalam mengelola sumber-sumber penerimaan PAD
2. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
3. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.
4. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Namun secara umum penyebab rendahnya PAD terletak pada unsur perpajakan dimana tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Soppeng yang sudah sejahtera namun tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah yanaga merupakan salah satu indikator penting peningkatan PAD di kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) mengatakan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Soppeng mengalami penurunan (pertumbuhan Negatif) selama 8 Tahun terakhir (2003-2010) hal ini diakibatkan oleh menurunnya PAD untuk setiap tahunnya.

5.4 Pengaruh Simultan Rasio Kemandirian, Efektifitas dan Pertumbuhan PAD terhadap Efisiensi PAD

Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan), diperoleh F_{hitung} sebesar 2.902 dan F_{tabel} sebesar 2,67 dengan nilai signifikansi 0,029. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan PAD berpengaruh secara simultan terhadap efisiensi PAD. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jika rasio kemandirian, efektifitas mengalami peningkatan

maka akan meningkatkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. Namun rasio pertumbuhan PAD kabupaten soppeng mengalami pertumbuhan negatif. Pemanfaatan potensi sumber daya Kabupaten Soppeng memberikan sumbangsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika terus dikelola dan dikembangkan maka kedepannya PAD Kabupaten Soppeng mampu lebih besar lagi.

5. KESIMPULAN

- Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD Pemkab Soppeng pada tiga tahun terakhir (2013-2015). Dengan demikian apabila rasio kemandirian meningkat maka efisiensi PAD juga akan meningkat.
- Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab Soppeng berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015). Dengan demikian apabila rasio efektifitas meningkat maka efisiensi PAD juga akan meningkat.
- Secara parsial, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemkab Soppeng berpengaruh negative dan signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015).
- Secara simultan, rasio kemandirian, efektifitas, dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada tiga tahun terakhir (2013-2015).

6. REFERENSI

Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro.

Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi I, Yogyakarta: Kressi Wacana

Budizarto, B. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Semarang, Ekonomi Daerah*, Surabaya.

Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks

Fakmi, Irfan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampung: ALFABETA

Felidhan. 2007. "Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack Dengan Variabel Pemoderasi Ketidaksiapan Lingkungan Dan Kohesivitas Kelompok". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Hal. 207-221, Vol. 6, No. 2 September 2007.

Halm, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Salemba Empat.

Halm, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik* Jakarta: Salemba Empat.

Heri, Tryono. 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

<http://beta.fajar.co.id/read-20110912212451-bpk-temukan-dana-bermasalah-43-m> diakses 30 20 Agustus 2016.

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jusumawati. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barru terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Krisna, P. 2003. *Kepemerintahan yang baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Maju Mundur.

Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Munir, Dasril, Henry Arsy Djuanda Dan Hessel Negi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan Bupati Soppeng No. 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKAD Kabupaten Soppeng

Ori, Agustina. 2013. *Jurnal Analisis Kinerja Penyelenggaraan Keuangan daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah, Studi Kasus Kota Malang, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Urawijaya*.

Rahmat. 2015. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Gowa Terhadap Aspek Kelembagaan masyarakat*. Jurusan Manajemen Keuangan Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop. Makassar

Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah. No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 192. Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Santoso, Oldison. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe*. *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi, Manado*, Vol. 2, No. 3 <http://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5904/5436>

Sawitri. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otomi daerah*, Bandung: Maju Mundur.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yuniarti, Gultom. 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo di ottonomi daerah Tahun 2001-2010*. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Yuni, Kusumaning, Ayu. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Kediri Tahun Anggaran 2009-2012)*.

Yuwono, Sony, Teungku Agus Indrajaya dan Hariyandi. 2005. *Malang, Penganggaran Sektor Publik*, bayumedia Publishing.